

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mulai terealisasi secara efektif sejak tahun 2000 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui kembali melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya perkembangan kondisi, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai sudah tidak sesuai. Oleh karena itu, diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diterapkan dengan harapan suatu daerah dapat mandiri dengan mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing, selanjutnya dapat mengurangi ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan suatu daerah dikatakan rendah jika daerah tersebut menggunakan sebagian besar dana yang bersumber dari daerah itu sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Penerapan otonomi daerah

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Salah satu komponen utama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Oleh karena itu, daerah harus mengetahui sumber-sumber potensial yang dapat dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, baik dari sumber potensial yang telah tersedia maupun mencari sumber potensial yang baru.

Sebagai ibukota negara, realisasi pendapatan daerah yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta terus menerus bertambah di setiap tahunnya. Total penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta sempat mengalami penurunan di tahun 2018 (BPS, 2021). Namun, angka ini kembali naik di tahun 2019. Pada masa pandemi Covid-19 varian Delta menyerang di tahun 2020, realisasi penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta hampir mencapai Rp83 triliun. Pajak daerah selalu menjadi kontribusi terbesar dalam struktur PAD Provinsi DKI Jakarta dan hampir selalu bertambah dari tahun ke tahun.

Disisi lain, adanya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian pun ikut terkena dampak yang cukup signifikan. Pada triwulan III 2021, perekonomian DKI Jakarta menunjukkan pertumbuhan ke arah positif sebesar 2,43 persen (BI, 2021). Jika dibandingkan pada triwulan

sebelumnya, angka ini mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan melonjaknya kasus positif Covid-19 varian Delta sehingga pemerintah melakukan penerapan kebijakan PPKM Darurat dan PPKM Level 4. Setelah kasus positif tersebut dinilai menurun, pemerintah memutuskan untuk menurunkan level PPKM menjadi PPKM Level 3. Tentunya, hal ini membuat perekonomian DKI Jakarta dapat bergerak kembali.

Satu tahun yang lalu, kondisi perekonomian DKI Jakarta juga sempat mengalami kontraksi yang cukup mendalam yaitu sebesar -8,22 persen (yoy) pada triwulan II 2020. Hal ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang mengurangi segala aktivitas masyarakat melalui penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada triwulan III 2020, perekonomian DKI Jakarta sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik walaupun masih dalam kondisi kontraksi yakni tumbuh negatif sebesar -3,82 persen (yoy) (BI, 2020). Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang memberikan berbagai stimulus fiskal melalui insentif perpajakan dan belanja pemerintah.

Kondisi ini diperkuat dari inflasi Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 yang ditandai oleh permintaan barang dan jasa meningkat tanpa diimbangi dengan penawaran yang memadai sehingga terjadi kenaikan harga. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan PPKM yang levelnya telah diturunkan oleh pemerintah sehingga kegiatan masyarakat kembali beroperasi penuh seperti perkantoran, perdagangan, dan kegiatan belajar mengajar. Pada November 2021, inflasi Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,40 persen (BPS, 2021). Inflasi Provinsi DKI Jakarta sempat mencapai 0,27 persen pada bulan yang sama di tahun sebelumnya. Angka ini meningkat

cukup drastis jika dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 0,01 persen (BPS, 2020). Hal ini hampir terjadi di seluruh kelompok pengeluaran inflasi akibat dari pelanggaran kebijakan PSBB. Sebelumnya, kebijakan PSBB membuat kegiatan perekonomian menjadi lesu, terutama perekonomian non-esensial di ibukota. Hal ini berpengaruh pada keinginan dan daya beli masyarakat.

Persentase penduduk miskin yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi selama periode tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2018, persentase penduduk mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitupun pada tahun 2019. Namun, angka ini melonjak drastis di tahun 2020, semula 3,47 persen menjadi 4,53 persen (BPS, 2020). DKI Jakarta banyak bergantung di sektor ekonomi dan jasa sehingga dampak yang dirasakan dari pandemi ini cukup luar biasa, terutama pada masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pengemudi *online*, pedagang makanan/minuman, dan para pelaku UMKM. Terlebih jika tingkat pendidikan yang dimiliki sangat rendah, maka kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak akan semakin kecil.

Penurunan kesempatan kerja juga tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang melambung drastis per Agustus 2020, yaitu mencapai 10,95 persen (BPS, 2020). Angka ini menjadi angka tertinggi yang dimiliki DKI Jakarta sejak enam tahun terakhir sekaligus menjadi TPT tertinggi se-Indonesia. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2019, angka TPT ini meningkat sebesar 4,41 persen. Kota Jakarta Barat menjadi penyumbang jumlah pengangguran terbanyak se-DKI Jakarta (BPS, 2020).

Jika dilihat Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi tahun 2016-2020, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama nasional dengan nilai PDRB terbanyak selama lima tahun berturut-turut. Nilai PDRB DKI Jakarta selalu lebih dari Rp1,5 triliun. Angka PDRB tertinggi yang pernah dimiliki DKI Jakarta adalah sebesar Rp1,836 triliun di tahun 2019. Namun, angka ini menurun 2,36 persen di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 (BPS, 2021).

Suatu daerah dapat mengetahui sektor mana saja yang memiliki potensi atau keunggulan untuk dijadikan sektor basis melalui PDRB maupun PDB. Kemudian, sektor basis tersebut dapat dimaksimalkan sebagai sumber penerimaan daerah, dalam hal ini biasanya dilakukan ekspor ke daerah lain. Semakin tinggi penerimaan daerah, semakin besar peluang daerah tersebut untuk mencapai tujuannya dalam rangka pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait sektor basis di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dengan data PDRB DKI Jakarta dan PDB Nasional. Selanjutnya, penulis akan menganalisa hubungan sektor basis tersebut dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian tersebut nantinya akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Identifikasi Sektor Basis Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah: Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020.”

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan kontributor terhadap PDB Nasional yang menempati urutan pertama dengan kontribusinya sebesar 17 persen terhadap perekonomian nasional namun masih memiliki angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian pada proposal karya tulis ini antara lain:

1. Sektor apa yang menjadi sektor basis di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pengembangan ekonomi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini antara lain:

1. Mengetahui sektor basis di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020.
2. Mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pengembangan ekonomi.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam penulisan karya tulis ini akan berfokus pada sektor basis di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai peringkat pertama yang memiliki PDRB terbanyak secara nasional tetapi memiliki angka pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi. Selanjutnya, penulis akan

melakukan analisis sektor basis ekonomi Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Pembahasan dalam karya tulis tugas akhir ini terbatas pada tahun anggaran 2016–2020. Dari hasil analisis menggunakan metode LQ, pembahasan selanjutnya akan menjabarkan apakah kebijakan yang ditempuh Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dioptimalkan. Pembahasan tersebut akan fokus pada postur APBD DKI Jakarta terutama bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan informasi terkait sektor basis yang ada di Provinsi DKI Jakarta agar dapat dioptimalkan di masa mendatang. Melalui optimalisasi potensi yang ada, diharapkan angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi DKI Jakarta dapat berkurang sehingga kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta juga ikut meningkat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap sektor basis di Provinsi DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan literatur yang baru terkait sektor basis di Provinsi DKI Jakarta bagi masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya

dapat mengoptimalkan peluang-peluang yang ada saat ini sehingga mampu meningkatkan kondisi perekonomian dan mendorong pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan penulis dalam proses penyusunan karya tulis tugas akhir antara lain:

1. Metode Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2017) studi pustaka didefinisikan sebagai kajian teoritis dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang mengalami perkembangan pada situasi sosial yang diteliti. Sementara itu, menurut Nazir (1988) penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan mengumpulkan, membaca, mengutip sumber sesuai topik dan objek penelitian melalui buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, *website* resmi dan berbagai jenis literatur lainnya. Melalui metode ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan informasi yang sesuai dengan topik yang akan dibahas.

2. Rencana Data Sekunder

Rencana data sekunder yang akan digunakan oleh penulis antara lain:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 oleh Badan Pusat Statistik.
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Indonesia Tahun 2016-2020 oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016–2020 oleh Badan Pusat Statistik
- d. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Seri 2010 Indonesia Tahun 2016–2020 oleh Badan Pusat Statistik.
- e. Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka Berbagai Tahun oleh Badan Pusat Statistik
- f. Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Berbagai Tahun oleh Bank Indonesia.
- g. Berita Resmi Statistik Berbagai Tahun oleh Badan Pusat Statistik.

1.7 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis akan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Analisis *Location Quotient* merupakan salah satu cara analisis yang bertujuan untuk mengetahui sektor basis maupun sektor non-basis di suatu wilayah tertentu lalu dibandingkan dengan daerah yang berada satu tingkat di atasnya dalam kurun waktu tertentu (Putra, 2011, dikutip dalam Hariyoko dan Puspaningtyas, 2020). Singkatnya, metode ini dapat menunjukkan gambaran

umum yang berkaitan dengan seberapa besar kemampuan atau pengaruh suatu sektor perekonomian dengan membandingkan antara suatu wilayah dengan wilayah satu tingkat di atasnya.

Metode ini berfokus pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian dengan cara mengkaji dari kondisi perekonomian (Ali dan Bakar, 2011). Dari hasil perhitungan LQ, dapat diketahui sektor mana yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam proses penelitian karya tulis tugas akhir ini, penulis akan mengidentifikasi sektor ekonomi basis maupun non-basis di Provinsi DKI Jakarta.

Metode LQ dapat dibagi menjadi *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Penjelasannya sebagai berikut.

a. *Static Location Quotient* (SLQ)

Analisis SLQ didefinisikan sebagai suatu metode permulaan dalam mengidentifikasi keunggulan sektor ekonomi di suatu daerah (Kuncoro, 2012, dikutip dalam Wibisono *et al.*, 2019). Metode ini membandingkan antara kapabilitas sektor tertentu di suatu daerah dengan kapabilitas sektor yang sama di daerah yang berada pada level satu tingkat di atasnya. Adapun rumus SLQ sebagai berikut:

$$SLQ = \frac{\frac{x_i}{PDRB}}{\frac{X_i}{PDB}}$$

Keterangan:

SLQ = Indeks/Koefisien SLQ di sektor i

x_i = Nilai PDRB sektor i yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta

PDRB = Total PDRB yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta

X_i = Nilai PDB sektor i di Indonesia

PDB = Total PDB di Indonesia

Dari perhitungan rumus di atas akan menghasilkan:

- $SLQ < 1$, artinya sektor tersebut tergolong sektor non-basis di Provinsi DKI Jakarta karena belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga tidak melakukan ekspor output dari sektor tersebut. Oleh karena itu, masih perlu melakukan impor dari daerah lain;
- $SLQ = 1$, artinya sektor tersebut merupakan sektor non-basis di Provinsi DKI Jakarta karena sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya sendiri sehingga belum melakukan ekspor ke daerah lain;
- $SLQ > 1$, artinya sektor tersebut merupakan sektor basis di Provinsi DKI Jakarta karena sudah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan daerah lain sekaligus sudah mampu melakukan ekspor output dari sektor tersebut.

b. *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Metode DLQ merupakan bentuk SLQ yang telah dimodifikasi. Analisis ini menunjukkan laju pertumbuhan sektor unggulan di suatu daerah. Artinya, perkembangan LQ dapat dilihat terjadi peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu (Tarigan, 2009, dikutip dalam Hidayat dan Supriharjo, 2014). Berikut rumus perhitungan DLQ:

$$DLQ = \left[\frac{(1 + g_j) / (1 + G_j)}{(1 + g_i) / (1 + G_i)} \right]^t$$

Keterangan:

DLQ = Indeks/Koefisien DLQ di sektor i

g_j = Laju pertumbuhan sektor i yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta

G_j = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di Provinsi DKI Jakarta

g_i = Laju pertumbuhan sektor i di Indonesia

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di Indonesia

t = Selisih tahun akhir dan tahun awal

Dari rumus diatas, maka akan dihasilkan sebagai berikut:

- $DLQ > 1$, artinya laju pertumbuhan sektor i di Provinsi DKI Jakarta lebih cepat daripada laju pertumbuhan sektor yang sama di Indonesia;
- $DLQ = 1$, artinya laju pertumbuhan sektor i di Provinsi DKI Jakarta sebanding dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di Indonesia;
- $DLQ < 1$, artinya perkembangan sektor i di Provinsi DKI Jakarta lebih lambat daripada laju pertumbuhan sektor yang sama di Indonesia.

Langkah selanjutnya adalah hasil SLQ dan DLQ digabungkan dan digolongkan menjadi empat kategori (Kuncoro, 2012, dikutip dalam Wibisono *et al.*, 2019). Kategori tersebut adalah unggulan, andalan, prospektif, dan tertinggal.

- $SLQ > 1$ dan $DLQ > 1$ maka dikategorikan sebagai sektor unggulan;
- $SLQ > 1$ dan $DLQ < 1$ maka dikategorikan sebagai sektor prospektif;
- $SLQ < 1$ dan $DLQ > 1$ maka dikategorikan sebagai sektor andalan;
- $SLQ < 1$ dan $DLQ < 1$ maka dikategorikan sebagai sektor tertinggal.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, maka akan ditemukan sektor basis ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, penulis akan membandingkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta khususnya bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sektor basis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta. Jika sebagian besar PAD bersumber dari sektor basis, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai karena telah mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Namun, jika sumber PAD didominasi oleh sektor non-basis, maka kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dikaji ulang karena belum memaksimalkan sektor yang berpotensi dan perlu suatu tindakan agar dapat mengedepankan sektor basis sebagai sumber penerimaan daerah.

1. 8 Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KTTA

HALAMAN PERNYATAAN LULUS

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Ruang Lingkup Penelitian
- 1.5 Manfaat Penulisan
- 1.6 Metode Pengumpulan Data
- 1.7 Metode Analisis Data
- 1.8 Sistematika Penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Teori Pembangunan Ekonomi
 - 2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah
- 2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- 2.3 Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
- 2.4 Teori Basis Ekonomi
 - 2.4.1 Sektor Basis
- 2.5 Analisis *Location Quotient* (LQ)
 - 2.5.1 Analisis *Static Location Quotient* (SLQ)
 - 2.5.2 Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Metode Pengumpulan Data
 - 3.1.1 Studi Kepustakaan
 - 3.1.2 Data Sekunder

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

3.2.1.1 Analisis *Static Location Quotient* (SLQ)

3.2.1.2 Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

3.2.1.3 Analisis Gabungan *Static Location Quotient* (SLQ)

dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

3.3 Gambaran Umum Objek Penulisan

3.3.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI

Jakarta

3.4 Hasil Analisis dan Pembahasan

3.4.1 Analisis Hasil *Location Quotient* (LQ) dalam Penentuan

Sektor Basis di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

3.4.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

Pengembangan Ekonomi

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP